

Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Mewujudkan Desa Mandiri

Farida Farida¹, Mery Wanialisa², Nursina³, Ruwaida⁴, Nur Wahyuni⁵

^{1,2,3,4,5}UPI YAI

Jalan Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat

E-mail : faridawongjowo@gmail.com, wanialisa@gmail.com, nursina.nasir@yahoo.co.id,
druweda@gmail.com, n_wahyunii@yahoo.com

ABSTRAK

Kemandirian desa merupakan tujuan dari program dana desa. Dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dana desa diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan meningkatkan pelayanan publik di desa. Tujuan ini bisa dicapai jika pemanfaatan dana desa bisa optimal sehingga desa masuk kategori sebagai desa mandiri, mengacu pada indeks pembangunan desa. Adapun tujuan dari penelitian abdimas ini adalah untuk memberikan penyuluhan dan pemahaman pemanfaatan dana desa yang lebih baik yang membutuhkan partisipasi aktif dan masukan kebijakan strategis dari perguruan tinggi dan masyarakat luas. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Teknik pengambilan data dengan cara wawancara, kuesioner dan *focus discussion group* (FGD). Lokasi penelitian abdimas ada di dua lokasi yaitu Desa Laksanamekar di Kecamatan Padalarang dan Desa Tanimulya di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Hasil dari penelitian abdimas ini menghasilkan beberapa rekomendasi bagi desa desa dan pemerintah dalam melanjutkan program dana desa.

Kata kunci: Dana desa, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pelayanan publik, abdimas

ABSTRACT

Village independence is the goal of the village fund program. Village funds are used for infrastructure development and community empowerment. The purpose of village funds is expected to be able to alleviate poverty, advance the village economy, overcome the development gap between villages, and improve public services in the village. This goal can be achieved if the utilization of village funds can be optimal so that the village is categorized as an independent village, referring to the village development index. The purpose of the community engagement (abdimas) research is to achieve the goals of independent village development through the use of better village funds that require active participation and strategic policy input from universities and the wider community. The analysis in this study is descriptive analysis. Data collection techniques used interviews, questionnaires and focus groups discussion (FGD). The abdimas research location is in two locations, namely Laksanamekar Village in Padalarang District and Tanimulya Village in Ngamprah District, West Bandung Regency. The results of the research team produced several recommendations for villages and the government in continuing the village fund program.

Keywords: village fund, community empowerment, community participation. Public services

1. PENDAHULUAN

Desa mandiri merupakan tujuan dari pemanfaatan dana desa yang optimal melalui pembangunan infrastruktur pedesaan. Desa mandiri belum ada definisi yang baku, namun merujuk pada indikator-indikator yang digunakan untuk mengklasifikasi desa berdasarkan indeks pembangunan desa (IPD). Infrastruktur pedesaan seperti jalan desa maupun jembatan desa akan menghubungkan antar desa satu dengan desa lain, sehingga memudahkan warga dan aparat dalam melayani masyarakat. Pemanfaatan dana desa yang optimal akan mampu mendorong desa untuk dapat menyediakan fasilitas pelayanan publik bagi warga yang kurang mampu, sekaligus mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi warganya. Ketersediaan lapangan pekerjaan di desa tersebut akan mengurangi pengangguran, sekaligus mengurangi kemiskinan. Semakin banyak desa mandiri, desa akan menjadi ujung tombak yang berperan dalam pengentasan kemiskinan secara nasional. Sehingga sangat logis jika pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi keberhasilan pembangunan nasional (Rahayu, 2017)

Pembangunan infrastruktur pedesaan diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi desa semakin lancar, dan mengurangi beban ekonomi yang harus ditanggung warganya. Meskipun program pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP), berdasarkan penelitian (Cakrawijaya, et al. 2014) di Desa Wonokerto secara umum manfaatnya hanya dirasakan sebagian kecil masyarakat, bersifat sementara atau tidak berkelanjutan. Peningkatan aktifitas ekonomi diharapkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat desa setempat. Semakin sejahtera desa, maka akan meningkatkan kemampuan warga untuk membangun desa dengan dananya

sendiri, selain dari dana desa dari pemerintah pusat. Sehingga dengan optimalisasi dana desa diharapkan masyarakat mampu menggali potensi-potensi ekonomi yang bisa dikembangkan baik secara perorangan, kelompok maupun melalui pembentukan kelembagaan bersama seperti BUM Desa (Nugrahaningsih et al. 2016). Dengan infrastruktur desa yang semakin memadai, akan bisa menghubungkan BUM Desa antar desa yang memiliki potensi dan pengembangan sumber daya yang sama, sehingga bisa membentuk kawasan pedesaan.

Kepemilikan BUM Desa bisa diperluas kepemilikannya yaitu antar desa di suatu kawasan pedesaan. Semakin besar dan luas jangkauan pelayanan BUM Desa, akan semakin kuat dan mandiri kelembagaan tersebut untuk mensejahterakan warganya. Meskipun penelitian (Anggraeni, 2016) menemukan keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat signifikan secara langsung terhadap kesejahteraan warga, namun memberi perubahan bidang sosial ekonomi. BUMDes akan bisa menjadi basis ekonomi kreatif sebagai penggerak dan pendukung pertumbuhan ekonomi produktif maka perlu dikelola secara kelembagaan (Allwar, et al. 2018).

Kelembagaan desa yang kuat mendorong terbentuknya modal usaha kolektif masyarakat. Selain pembentukan BUM Desa, penggalangan modal masyarakat dapat membentuk koperasi produksi, koperasi nelayan, koperasi petani maupun jenis-jenis koperasi lainnya. Produksi dilakukan oleh masyarakat setempat dengan akses pasar oleh masyarakat setempat dan sekitarnya maupun didistribusikan keluar daerah. Pada akhirnya timbul kesadaran terhadap pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan karena adanya rasa memiliki.

Desa mandiri tentunya pembangunan desa yang melibatkan masyarakat setempat, dan warganya pun peduli dengan desanya. Masyarakat akan melek literasi dengan keuangan desa, mendorong terjadinya transparansi dan akuntabilitas lembaga desa. Semakin peduli masyarakat terhadap desanya, maka kelembagaan ekonomi desa pun akan semakin kuat. Keaktifan warga dan peduli desa mendorong keterlibatan warga dalam menyusun RPJM Desa, anggaran pembangunan desa maupun RKP.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan dari penelitian abdimas ini adalah memberikan penyuluhan dan memotivasi masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan desa mandiri melalui pemanfaatan dana desa yang lebih baik yang membutuhkan partisipasi aktif dan masukan kebijakan strategis dari perguruan tinggi dan masyarakat luas.

2. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi oleh desa desa dalam memanfaatkan dana desa belum sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas desa tanpa melanggar aturan. Pemanfaatan dana desa dan pengelolaan agar produktif dan menciptakan pendapatan desa. Perangkat desa ingin mendapatkan penyuluhan dan informasi informasi bagaimana pembentukan BUMDes dan usaha usaha kreatif masyarakat yang bisa dikembangkan. Desa desa sebenarnya memiliki potensi alam dan ekonomi kreatif di masyarakat, namun belum bisa berkembang dan dimanfaatkan. Padahal dengan dana desa potensi tersebut bisa dikembangkan dan menjadi desa mandiri.

3. METODOLOGI

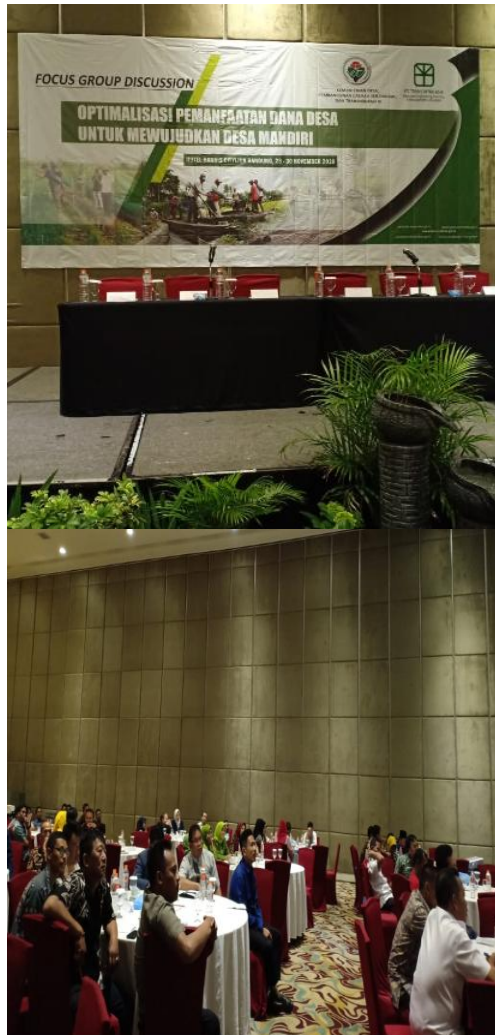
Penelitian abdimas dilaksanakan di Bandung, bertempat di Hotel Haris Citylink selama tiga hari pada hari Rabu – Jumat, tanggal 28 – 30 November 2018 dan kunjungan ke dua lokasi desa contoh yaitu Desa Laksana Mekar Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Desa kedua yaitu Desa Tani Mulya Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, menyebarkan kuesioner dan menyelenggarakan *focus group discussion* (FGD).

Peserta yang menghadiri abdimas sebanyak 80 orang, yang terdiri dari 4 perwakilan sekretariat advisor, Kementerian Desa, PDT dan transmigrasi, 8 perwakilan dari sekretariat Jendral, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, 3 perwakilan kepala dinas pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, perwakilan dari beberapa perangkat desa, tenaga ahli P3MD (program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, beberapa perangkat PID (program inovasi desa), dan perwakilan akademisi dan organisasi masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Focus group discussion (FGD) dilaksanakan dengan mengusung tema “Optimalisasi Prmanfaatana Dana Desa Menuju Desa Mandiri”. Para narasumber berasal dari para ahli dari advisory Kementerian desa, pemerintahan daerah tertinggal dan transmigrasi. Terkait dengan upaya mewujudkan pembangunan yang merata melalui implementasi nawacita ke-3 yaitu membangun berawal dari desa-desa pinggiran sebagai kerangka Negara kesatuan. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dan kawasan

pedesaan harus berkualitas. Fokus pembangunan desa dalam rangka meningkatkan produktifitas masyarakat desa, pemerintah memiliki 4 program prioritas pembangunan desa yaitu prukades (produk unggulan kawasan pedesaan), BUM Desa, Embung, dan sarana olahraga desa.



Gambar 1. Suasana FGD di Bandung

Perencanaan dan pelaksanaan yang baik hendaknya didukung dengan pendanaan dan kegiatan harus terkonsolidasi dengan baik dalam pembangunan desa dan pedesaan (K/L, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD maupun swasta). Sumber pendapatan desa terdiri dari; 1)

pendapatan asli desa, 2) dana desa dari alokasi APBN, 3) Bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), minimal 10 persen, 4) alokasi dana desa, minimal 10% dari DAU dan DBH (dana bagi hasil), 5) bantuan keuangan dari APBD, 6) hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Dana desa merupakan dana dari APBN yang ditransfer melalui APBD kab/kota yang diprioritas untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan dana desa tersebut untuk mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan meningkatkan pelayanan publik di desa (DJPk, Kemenkeu). Pada tahun 2018 dana desa yang sudah disalurkan mencapai Rp 60 triliun atau naik 188,46 persen dari Rp 20,8 T di tahun 2015. Meskipun jumlah desa meningkat dari 74.093 di tahun 2015 menjadi 74.958 desa di tahun 2018, namun rata-rata dana desa per desa juga mengalami peningkatan yang signifikan Rp 1,3 Milyar di tahun 2018 atau dari jumlah Rp 772 juta di tahun 2015.

Tabel 1. Perkembangan dana desa nasional

	2015	2016	2017	2018
Dana desa (Rp T)	20,8	47	60	60
ADD (Rp T) Bagi Hasil PDRD (Rp T)	33,8	35,5	34,1	33,9
Total (Rp T)	57,3	85,3	97,2	97,4
Jumlah desa Rata-rata/desa (jt)	74.093	74.754	74.954	74.958
	772	1.140	1.300	1.300

Pencapaian output atas pemanfaatan dana desa dapat ditingkatkan secara lebih signifikan melalui sinergi dan kerjasama pengelolaan dana desa antara pemerintah

dan masyarakat yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, pengurangan pengangguran (Mahamurah et al, ___), serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sarana/prasarana dasar publik yang dibangun antara lain; jembatan, sambungan air bersih, embung desa, posyandu, paud desa, sumur dan MCK, dan drainase dan irigasi.

Distribusi dana desa nasional biasanya masih digunakan untuk belanja infrastruktur (70-95%), sedangkan sisanya untuk program pemberdayaan masyarakat. Seiring dengan besarnya dana desa yang digelontorkan setiap tahun, terjadi pula pengurangan kemiskinan pedesaan yaitu pengurangan tertinggi di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sebaliknya tidak terjadi pengurangan kemiskinan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Banten, Maluku Utara dan Gorontalo. Penelitian selanjutnya diperlukan untuk membuktikan apakah dana desa yang digelontorkan memiliki dampak positif secara langsung dengan tingkat kemiskinan di pedesaan.

Berdasarkan analisis indeks pembangunan desa bulan Mei 2018, jumlah desa mandiri sebanyak 5.216 desa, desa berkembang 57.341 desa, desa tertinggal 12.397 desa. Terjadi kenaikan status dari desa berkembang menjadi desa mandiri sebanyak 2.985 desa. Dengan optimalisasi pemanfaatan dana desa, diharapkan desa mampu meningkatkan status mandiri semakin banyak. Di Papua Barat, status desa semuanya masih sebagai desa berkembang, belum ada desa yang mandiri.

Selama FGD berhasil mencatatkan kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan dana desa yaitu pada saat proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian. Saat proses perencanaan terjadi kelemahan seperti

kurangnya kualitas Musdes dan produk perencanaan, kurang mampu pengelolaan dana desa, kurangnya koordinasi, intervensi dan kurangnya pendamping desa. Pada saat pengorganisasian terjadi lemahnya pemilihan anggota BPD, pengangkatan perangkat desa, penunjukan TPK, membentuk BUM Desa tanpa Perdes. Kelemahan pada saat proses pelaksanaan yaitu tersendatnya pencairan dana desa, terjadi penyimpangan dalam menggunakan dana desa, kecurangan dalam pelaksanaan kegiatan, kurangnya pengaruh budaya lokal. Dalam proses pengendalian, kelemahan pada kurang berfungsinya BPD, kecamatan, kab/kota, propinsi dalam proses monitoring dan evaluasi.

Salah satu narasumber dalam FGD menyatakan bahwa perlunya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa ini. Partisipasi (pandangan politik) yaitu memberikan kekuasaan kepada masyarakat untuk mengambil keputusan secara otonom. Sedangkan partisipasi (pandangan teknis) yaitu keikutsertaan masyarakat di dalam setiap tahapan kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi. Adapun tujuan dari partisipasi masyarakat ini adalah demokrasi, pemberdayaan, rasa memiliki, biaya lebih murah, pemerataan pembangunan dan keberlanjutan. Keterlibatan anggota masyarakat berarti masyarakat sekaligus sebagai penerima manfaat pembangunan atau juga sebagai penyumbang aktif pada proses pembangunan (Abdullah, et al. 2011).

Kondisi desa saat ini masih sebagai pasar dari produk-produk yang berasal dari luar seperti HP, kendaraan, pulsa, barang-barang elektronik. Akibatnya uang dari desa tergerus ke kota, inflasi desa lebih tinggi dari kota, orang miskin meningkat, keerasan sosial melemah karena terlalu orientasi ekonomi, teknologi. Kondisi-kondisi seperti ini

perlu dicari solusi agar dana desa benar-benar bermanfaat dan tidak melemahkan hubungan masyarakat yang terlalu hedonis.

Pemikiran dari perguruan tinggi dan masyarakat luas dalam FGD adalah penting adanya sinergi desa membangun dengan pembangunan oleh pihak luar desa (Ermaya, 2015). Sinergi ini akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan oleh desa. Desa membangun dilakukan oleh internal desa sedangkan membangun desa merupakan eksternal desa. Masalah-masalah yang terekam oleh akademisi yaitu akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Negara yang sering berubah, belum ada keterkaitan yang jelas dengan perbaikan kondisi kelompok miskin, adanya potensi mengerosi keswadayaan dan kegotongroyongan warga, dan belum jelas kaitannya dengan peningkatan status perkembangan/tipologi desa.

Pemikiran lain tentang pemanfaatan dana desa adalah sebagai Negara maritim, maka penguatan ekonomi lokal berbasis agro maritime juga menarik yang dipadu dengan program industry 4.0. Isu-isu terkait pedesaan yaitu tentang konversi lahan pertanian dan dan rendahnya penguasaan lahan, penurunan nafkah basis agraris-maritim, krisis ekologi, SDM dan resiliensi komunitas. Dana desa diharapkan mampu menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat desa. Pendekatan yang ditawarkan adalah pendekatan *community driven development* dan pendekatan *village driving development*. Intinya partisipasif masyarakat dan penguatan ekonomi dan kapasitas lokal. Sementara terdapat tantangan bisnis agro-maritim dari on-farm, processing sampai off-farm & market. Untuk mewujudkan desa mandiri maritime dalam agro-maritim 4.0 adalah adanya pengelolaan wilayah darat dan laut secara inklusif dan integrasi yang melibatkan

sistem sosial, ekonomi, ekologi. Untuk itu perlu didukung teknologi digital.

Kunjungan Lokasi 1: Desa Laksanamekar

Desa Laksanamekar masuk di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Sebagai desa hasil pemekaran di tahun 1984, perkembangan pembangunan desa relatif cukup berkembang. Rencana pembangunan desa tahun 2015-2021 dibagi menjadi dua yaitu; tiga tahun pertama 60% APBDES akan dialokasikan pelaksanaan pembangunan desa dan 40 persen akan dibagi bidang pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Tiga tahun kedua, alokasi dibalik, 40% buat pembangunan dan 60% buat pemberdayaan masyarakat.

Dana desa yang diterima Desa Laksanamekar yaitu Rp 326 juta pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp 1,12 milyar pada tahun 2018. Sementara total pendapatan tahun 2018 adalah Rp 2,8 milyar. Dengan demikian dana desa mencapai 75,38 persen. Tahun 2015 dilakukan pembangunan antara lain pendirian posyandu, dan septitank/MCK. Pada tahun 2016 dilakukan pembangunan antara lain tembok penahan tanah, pembangunan jalan lingkungan, perbaikan drainase, gorong-gorong. Tahun 2017 pembangunan drainase, gedung posyandu, betonisasi jalan desa, pembangunan bronjong. Pembangunan jalan lingkungan dilanjutkan pada tahap 1 di tahun 2018, selain juga pembangunan perbaikan drainase, dan pipanisasi.



Gambar 2. Suasana FGD di Desa Laksanamekar Kecamatan Padalarang

Kunjungan Lokasi 2: Desa Tanimulya

Desa Tanimulya ini ada di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Total APBDES tahun 2017 mencapai Rp 3,1 milyar. Dana desa mencapai Rp 1,0 milyar atau 32,21 persen dari total APB desa. Desa ini masuk dalam kategori desa mandiri. Pelayanan terhadap masyarakat sudah membuka pelayanan satu atap dengan motto “cepat, tepat dan akurat” dengan menggunakan aplikasi SMARD (system management administrasi desa) dan aplikasi-aplikasi lainnya.

Inovasi bidang pemberdayaan dan teknologi tepat guna menghasilkan produk-produk home industry, usaha kecil menengah. Ditunjang dengan sarana dan prasarana yang tersedia semakin menunjang pertumbuhan perekonomian warga Tanimulya. Berikut gambar 3 menampilkan produk-produk lokal yang dihasilkan masyarakat Desa Tanimulya.



Gambar 3. Produk-produk lokal masyarakat Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah

Rekomendasi

- Dana desa hendaknya untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat sektoral
- Program dan kegiatan peningkatan ekonomi seperti kegiatan BUM Desa.
- Meningkatkan porsi pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat
- Melakukan penguatan atas monitoring dan evaluasi, meningkatkan kapasitas SDM perangkat desa
- Adanya dana desa terkadang menyebabkan melemahnya kebersamaan warga dan gotong royong karena mengandalkan

dana dari pemerintah, sehingga perlu dipikirkan bagaimana dana desa ini tidak mendorong pemecahan keeratan masyarakat.

- Untuk Kabupaten Bandung Barat, hendaknya meningkatkan program mitigasi bencana karena wilayah tempat tinggal yang padat yang rentan bencana kebakaran.

5. KESIMPULAN

Desa dan kawasan pedesaan saat ini merupakan fokus dalam percepatan pembangunan daerah, khususnya daerah pinggiran. Jumlah penduduk miskin pedesaan secara umum mengalami penurunan, namun ada beberapa provinsi yang tidak terjadi penurunan. Akan tetapi orang miskin desa masih lebih tinggi dibandingkan orang miskin di perkotaan. Hal ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat apakah dana desa mampu memberikan dampak pada pengurangan kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemanfaatan dana desa masih memiliki kelemahan-kelemahan dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Agar pemanfaatan dana desa lebih baik, maka penting adanya partisipasi keterlibatan masyarakat dalam ikut perencanaan, memonitoring dan evaluasi. Penting aspirasi bawah atau masyarakat terkait pemanfaatan dana desa, jadi dana desa akan lebih terserap dalam penggunaannya. Keterlibatan masyarakat bukan akibat kesadaran yang terbangun akan melahirkan ketergantungan (Umanailo, 2018). Terakhir, belum ada kaitan antara pemanfaatan dana desa dengan IPD sebagai indikator pembangunan maupun inovasi desa.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. Y., Abu Bakar, N. R., Sulehan, J., Awang, A.H. dan

Liu, O.P. (2011). Komunikasi dan Pembangunan Komuniti Peringkat Desa: Berkongsi Pengalaman antara Indonesia dengan Malaysia. *Jurnal Melayu* (6), 227-237

Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada BUMDes di Gunung Kidul Yogyakarta. *MODUS*, Vol. 28 (2): 155-167

Allwar, Amin, T. M. dan Laksono, S. (2018). Pengembangan BUMDes Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Jawa Tengah. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, Vol. 03, Issue. 01

Cakrawijaya, M. A., Riyanto, B. dan Nuroji. (2014). Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 25, No. 2, 137-156

Ermaya, B. S. (2015). Kemandirian Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Kawasan Pedesaan. *Litigasi*, Vol. 16 (2), 2835-2874.

http://kedesa.id/id_ID/repository/indeks-pembangunan-desa-2014/

Mahamurah, D., Kaunah, M dan S. Sambiran. (____). Optimnalisasi Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi di Desa Nahepese Kecamatan Manganitu). *E-Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat*

Maulita et al. (2017). Implementasi Penatausahaan, Pengelolaan, dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi . *E-Journal*

- Ekonomi Bisnis dan Akutansi
Vol. IV (2): 152-158
- Nugrahaningsih, P., Falikhatun, F., dan Winarno, J. (2016). Optimalisasi Dana Desa dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) Menuju Desa Mandiri. *Jurnal Akutansi dan Bisnis*, Vol. 16, No. 1.
- Rahayu, D. (2017). Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal* 6 (2)
- Umanailo, M. C. B. (2018). Kalesang Desa dalam Membangun dari Desa. DOI: 10.31219/osf.io/jsx9k